**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP BANGUNAN
YANG DIDIRIKAN DI TANAH ULAYAT KAUM (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG)**

Nurul Aulia Zahra¹, Azmi Fendri², Yasniwati³
Email: nurulzahra700@gmail.com¹, azmifendri75@gmail.com²,
yasniwati@law.unand.ac.id³
Universitas Andalas

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan dan hubungan resmi antara dua individu yang secara resmi diakui oleh hukum dan masyarakat, Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan di mana timbulnya harta bawaan dan harta bersama, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh perkawinan, harta bersama adalah suatu harta perkawinan yang diperoleh antara suami dan istri pada saat perkawinan tersebut telah terjadi dan harta bersama tersebut merupakan harta di luar hadiah atau warisan. Didalam penelitian ini peneliti membahas 2 (dua) rumusan masalah, yang pertama membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama putusan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg yang lebih lanjut akan membahas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan dan analisis akhir dari putusan tersebut. Pada rumusan masalah kedua membahas tentang bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama terhadap bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum (studi kasus putusan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg), yang lebih lanjut membahas tentang akibat hukum pembagian harta bersama di tanah ulayat kaum, dimana berdasarkan hukum adat minangkabau tanah ulayat bersifat tetap. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat diambil kesimpulan peneliti berbeda pendapat dengan hakim tentang pembagian harta bersama di tanah ulayat kaum, karna peneliti berpendapat terdapat aspek hukum adat di dalamnya Dimana secara hukum adat minangkabau tanah ulayat tidak dapat di bagi atau bersifat tetap.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Tanah Ulayat Kaum.

Abstract

Marriage is bond And connection official between two individuals who are official acknowledged by law And society , marriage Also arrange about treasure wealth where the emergence treasure default And treasure together , property together interpreted as treasure wealth generated by husband wife during they are tied up by marriage , property together is a treasure marriage obtained between husband And wife on moment marriage the has happen And treasure together the is treasure outside present or legacy . Inside research This researcher discuss 2 (two) formulations problem , the first one discuss about How judge's consideration in determine distribution treasure together decision number 0288/ Rev.G /2013/ PA.Pdg which is more carry on will discuss about how the judge considers And analysis end from decision said . On formulation problem second discuss about How consequence law distribution treasure together to building erected on land customary law race (study case decision number 0288/ Pdt.G /2013/ PA.Pdg) , which is more carry on discuss about consequence law distribution treasure together on the ground customary law people , where based on law custom Minangkabau land customary law nature still . Study This is study normative , based on research that has been researcher do so can taken conclusion researcher different opinion with the judge about division treasure together on the ground customary law people , because researcher to argue there is aspect law customs in it Where in a way law custom Minangkabau land customary law No can be shared or nature still.

Keywords: Division Treasure Together , Customary Land People.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan dan hubungan resmi antara dua individu yang secara resmi diakui oleh hukum dan masyarakat, dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya diketahui undang-undang: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan tentunya memiliki konsekuensi hukum yang di antaranya hak dan kewajiban pasangan suami istri, seperti hak terhadap kedudukan atas anak, hak dan kewajiban sebagai orang tua, serta hak atas harta bersama.¹

Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan di mana timbulnya harta bawaan dan harta bersama, terlepas dari adanya harta tersebut bisa jadi didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan, harta yang didapat ketika perkawinan sedang berlangsung atau harta yang didapat oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Pasal 119 KUHPerdara pasal ini mengatur mengenai status harta dalam perkawinan “sejak saat di langsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri” maksudnya dalam hal tidak ada perjanjian perkawinan, segala barang yang diperoleh selama perkawinan menjadi barang bersama suami-istri. Pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang- Undang Perkawinan mengandung aspek religius, sosial, biologis, dan yuridis. Yang dapat diartikan bahwa mengandung aspek religious karena perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, aspek sosial karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, aspek biologis karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, aspek yuridis karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum.²

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan, Perjanjian ini mengatur pembagian harta dan hak serta kewajiban dalam perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan dan melindungi hak-hak masing-² Inya Nuansa Iliyini, Rihantoro Bayuaji, Khusnul Yakin, 2023, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris”, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2023, Vol 1, No 2, hlm 85. masing pihak. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU- XIII/2015 tidak boleh ada perjanjian kawin selama berlangsungnya perkawinan, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 yang dibuat oleh notaris jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. Didalam KUHPerdara tidak boleh, karna perjanjian kawin di buat sebelum berlangsungnya perkawinan dan perjanjian kawin hanya boleh sebatas harta bawaan sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diperjanjikan hanya harta bersama, harta bawaan tidak termasuk harta bersama, sehingga yang diperjanjikan itu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.³ Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ayat 2 “harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak

atas persetujuan kedua belah pihak” Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang didapatkan selama suami istri tersebut terikat dalam hubungan perkawinan dan harta tersebut bukan merupakan harta yang didapatkan melalui warisan, wasiat dan hibah. Pihak suami atau pun pihak istri dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap harta benda tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Sistem hukum pembagian harta bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian harta bersama ini berlaku ketika pasangan suami istri bercerai dan tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagiannya, beberapa jenis harta bersama dapat disimpulkan dalam tiga sumber:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Aturan mengenai pembagian harta bersama ada dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama. ⁵

Salah satu harta dalam perkawinan tidak terlepas dari tanah dan bangunan, di Indonesia dalam konsep hubungan antar manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (dwitunggal). Pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan masyarakat sehingga hubungannya tidak saja bersifat individualistik tapi lebih bersifat kolektif dengan tetap menghormati hak perorangan. Kedekatan manusia dengan tanah sangat erat, tanah sangat berperan penting bagi manusia sehingga diperlukan dukungan dengan pemberian jaminan hukum dan kepastian dari wilayah tanah yang ada dalam penguasaan masyarakat dan mendapat dukungan dengan aturan hukum tertulis yang lengkap dan isinya jelas tentang ketentuan kepemilikan lokasi tanah.⁶ Indonesia merupakan negara yang kehidupan perekonomiannya sebagian besar masih bergantung pada tanah, sehingga tanah mempunyai fungsi yang penting untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.⁷ Tanah dalam pengertian yuridis merupakan permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah di berikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, di berikan kepada dan dipunyai tanah dengan hak - hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja, untuk keperluan apa pun tidak bisa diperlukan juga penggunaan sebagai tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang di permukaan bumi.⁸ Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yaitu hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.⁹ Dapat dilihat dalam asas pemisahan horizontal dimana asas pemisah horizontal

merupakan bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Asas pemisahan horizontal yang dianut hukum tanah adat menyatakan bahwa bangunan, tanaman, dan benda-benda bersifat ekonomis lainnya yang ada di atas tanah bukanlah merupakan bagian dari tanah. Kata lain, kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan diatasnya, bangunan berada di bawah kepemilikan pihak yang membangun bangunan tersebut.¹⁰

Bangsa Indonesia menghendaki bahwa hukum agraria yang baru bersifat nasional, yaitu hukum agrarian yang berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang tercermin di dalam sila-sila Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat asli bangsa Indonesia, yaitu hukum adat, hukum adat mempunyai peranan penting dalam pembentukan UUPA.¹¹ Soekanto memberikan pengertian Hukum Adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya, Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.¹² Menurut Soepomo, hukum adat adalah “suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat”. Hukum Adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya. F.D. Hollemann dalam pidato inaugurasinya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*, mengemukakan ada empat corak atau sifat umum Hukum Adat yang merupakan satu kesatuan:

1. Magis Religius (*Magisch – Religieus*)

Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*), benda-benda itu punya daya gerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa). Sifat Magis religius ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Setelah masyarakat adat mengenal agama, maka sifat religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada

Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai gambaran dapat dilihat pada setiap keputusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Walaupun klausul tersebut karena peraturan mengharuskannya.¹³

2. Komunal (*Kebersamaan*)

Menurut pandangan Hukum Adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Masyarakat Hukum Adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

3. Konkret (Visual)

Sifat yang Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata yakni dengan pemindahan benda objek perjanjian. Berbeda dengan halnya Hukum Barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli, walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual.

4. Kontan (Tunai)

Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga.

Di samping 4 (empat) corak hukum Adat yang dikemukakan Holleman di atas, ada sifat khas lainnya dari hukum adat, yaitu:

a. Tradisional

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. 14

Peraturan yang turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus-menerus.

b. Dinamis

Hukum Adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

c. Terbuka

Hukum Adat memiliki sifat terbuka. Artinya, Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian.

d. Sederhana

Artinya, bahwa masyarakat hukum adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja, termasuk dalam hal pembagian warisan, jarang dilakukan secara tertulis.

e. Musyawarah dan Mufakat

Artinya, masyarakat hukum adat mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat. 15

Dengan demikian sifat dan corak hukum adat timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. 16 Tanah adat tersebut tidak memiliki pengaturan yang terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara, hal ini tercermin dalam asas-asas pengaturan penggunaan tanah untuk masyarakat dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan lainnya yang akan dijadikan pegangan masyarakat dalam fungsi tanah.

Terdapat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi yang disebut dengan dalam hukum adat “Hak Ulayat” yaitu hak persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah dalam suatu wilayah toritorial atau wilayah geneologis. Menurut kepustakaan hukum adat, bahwa yang pertama kali memperkenalkan istilah hak ulayat adalah Van Vollenhoven dengan diberi nama “Beschikking recht” (hak pertuanan) atau persekutuan hukum. Menurut Moh. Koesnoe perkataan “ulayat” pada dasarnya berarti suatu lingkungan tanah yang berada dalam kekuasaan yang sah suatu persekutuan. Bersamaan dengan kedatangan nenek moyang orang Minangkabau telah membagi jenis persekutuan dari empat suku, yaitu Koto, Piliang, Bodi dan Caniago. Kelompok-kelompok persekutuan tersebut memilih tempat tinggal di tempat-tempat yang ketinggian (perbukitan dan pegunungan), dan mereka membagi hutan antara persekutuan sebagai ulayat masing-masing. Dalam masyarakat Sumatra barat memahami betul adanya tanah ulayat, memahami tentang hak dan kewajiban atas tanah ulayat baik sebagai anggota masyarakat hukum adat maupun selaku pemangku adat.¹⁸ Hak ulayat ini mengandung aspek keperdataan dan aspek publik, aspek keperdataan yakni bahwa di wilayah ulayat di samping hak-hak bersama masyarakat juga terdapat hak-hak perorangan, sedangkan aspek publik yakni bahwa hak ulayat adalah hak kepunyaan bersama dari masyarakat hukum adat yang di dalamnya mengandung hak dan kewajiban dari penguasa adat untuk mengelola.

Kepemilikan atas tanah ulayat dari sudut pandang kebudayaan atau adat istiadat yang berlaku, menyatu dengan masyarakat hukum adat itu sendiri sebagai suatu persekutuan yang telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 3 UUPA menyatakan:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dapat dilihat dalam contoh kasus dimana dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG perkara ini merupakan gugatan seorang mantan suami terhadap mantan istri yang dimana bangunan rumah yang dibangun ketika ikatan perkawinan mereka yang sedang berlangsung, namun bangunan tersebut berdiri di atas tanah keluarga istri yang berstatus sebagai tanah kaum. Dalam putusan majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dan hakim menyatakan dalam pembagiannya dibagi dengan sama rata atau dibagi satu per dua ($\frac{1}{2}$) antara penggugat dengan tergugat dan objek perkara tersebut dimasukkan ke dalam pembagian harta bersama saja tanpa melibatkan aturan dari tanah ulayat. Sebagaimana tertera dalam Pasal 4 UUPA menyatakan:

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Sebagaimana yang terjadi dari contoh kasus dan Pasal 4 UUPA di atas bahwa di dalam UUPA menyatakan hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah. Sementara yang terjadi di suatu wilayah, bangunan yang berdiri di tanah ulayat, merupakan tanah kaum yang tidak diperbolehkan menjual atau mengibahkan harta tersebut kepada orang lain, hanya diperbolehkan menguasai atau memakai harta tersebut secara turun-temurun. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah ulayat “tanah ulayat bersifat tetap”, maksudnya tanah ulayat tidak dapat berubah status kepemilikannya. Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta

perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian;
4. Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan;¹⁹

Hakim di dalam putusannya menimbang bahwa oleh karena harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah ulayat kaum tersebut didapat atau diperoleh selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka masing-masing berhak separuhnya sesuai Pasal 97 KHI, maka harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan tergugat maka masing-masing berhak separuhnya.²⁰ Di dalam pertimbangan hakim ini, terlihat bahwa hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 KHI, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum adat juga di muat dalam memutuskan perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya, karena rumah tersebut berdiri di atas tanah ulayat kaum tergugat. Dimana secara hukum adat minangkabau tanah ulayat tidak dapat di bagi berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah ulayat “ azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat minangkabau ‘jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti perlu mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP BANGUNAN YANG DIDIRIKAN DI TANAH ULAYAT KAUM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG

karena peneliti merasa perlu mengkaji perihal tersebut, sebab akan menimbulkan ketimpangan hukum dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama mengingat terdapat aspek hukum adat dimana harta bersama tersebut berdiri ditanah ulayat kaum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan di terapkan dalam tesis ini ialah penelitian hukum normatif (normative legal research).⁵¹ Penelitian ini mengkaji kepustakaan yakni suatu penelitian yang dilakukan atau didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya atau terori yang ditentukan dari bahan- bahan yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Peraturan daerah Sumatra Barat Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- f. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

- g. Bahan Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan, Seperti Hukum Adat.
- h. Yurisprudensi.
- i. Putusan Pengadilan Agama Padang Perkara Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bahan yang membantu untuk menganalisis bahan hukum primer.⁵² Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya, jurnal dari kalangan hukum dan seterusnya, serta yang berhubungan dengan penelitian yaitu buku hukum, jurnal, teori para sarjana, hasil penelitian dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP BANGUNAN YANG DIDIRIKAN DI ATAS TANAH ULAYAT KAUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG)

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan perjanjian hukum didalam perkawinan memiliki beberapa tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bagi pasangan suami istri, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” dan Pasal 2 ayat 1 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan dalam Pasal 26 KUHPerdara “perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja”, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara dan Pasal 27 “Seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu orang perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan satu orang laki-laki”. Untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam KUHPerdara diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. Laki-laki yang belum mencapai umur 18 dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperkenankan mengadakan perkawinan (Pasal 29).
2. Bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir (Pasal 34).
3. Bagi pihak yang masih dibawah umur, harus memiliki izin dari orangtua atau walinya akan tetapi bila mana salah seorang yang memberikan izin telah hilang kekuasaannya orang tuanya maka pengadilan negeri setempat yang akan memberi izin (Pasal 35) .83

Namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian. perceraian secara umum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu cerai gugat dan cerai talak istilah cerai gugat dipakai apabila yang mengajukan gugatan atau yang menginginkan dilaksanakannya perceraian adalah seorang istri, sedangkan jika yang menginginkan dilaksanakannya perceraian adalah suami, maka istilah yang dipakai adalah cerai talak. Dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasa ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman. Bagi suami istri yang beragama islam perceraian tunduk pada kompilasi hukum islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam konteks islam istilah cerai gugat berbeda dengan Undang-undang perkawinan, jika dalam Undang-undang perkawinan bahwa gugat cerai bisa diajukan suami atau istri sedangkan gugat cerai menurut KHI gugatan diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 KHI. Sedangkan cerai talak dapat dilihat pengaturan dalam Pasal 114 KHI “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Setelah terjadinya perceraian, bukan berarti masalah keluarga tersebut

telah selesai, tapi masih meninggalkan masalah baru sisa dalam perkawinan tersebut seperti anak (jika punya) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁸⁴

Harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama. Apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸⁵ Sistem hukum pembagian harta Bersama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian harta bersama ini berlaku ketika pasangan suami istri bercerai dan tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagiannya, beberapa jenis harta bersama dapat disimpulkan dalam tiga sumber:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperoleh nya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka besama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.⁸⁶

Aturan mengenai pembagian harta bersama ada dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama. Dalam Pasal 97 Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam

86 Ibid, hlm 121.

perjanjian pernikahan”. Dan Pasal 119 KUHPerdara “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Pembagian harta bersama tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan yang diatur oleh undang- undang perkawinan dan diatur dalam kompilasi hukum islam dimana pembagian harta bersama dilakukan melalui proses sidang di pengadilan agama yang harus dihadiri kedua belah pihak (suami-isteri).⁸⁷ Pembagian harta bersama yang diakibatkan oleh perceraian menyebabkan harta tersebut terbagi, cara pembagian hartanya dengan membagi rata masing-masing (suami dan isteri) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta gono-gini tersebut.⁸⁸ Dalam perkara putusan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG penggugat dulunya merupakan suami yang sah dari tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 januari 1989 dan telah bercerai secara resmi di pengadilan agama padang.

Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, selain dari itu selama lebih kurang 23 (dua puluh tiga) tahun membina rumah tangga penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu, Satu unit bangunan rumah dengan ukuran 12m x 12.5m (luas 150 m²) yang sebelumnya merupakan rumah kediaman bersama yan dibangun sekitar bulan february 1991, dimana rumah tersebut berdiri diatas tanah kaum tergugat dan sekarang ditempati tergugat yang terletak di jalan jati rumah gadang kelurahan jati kecamatan padang timur kota padang. Barang-barang dagangan berupa aset toko pakaian collection yang terletak dijalan andalas, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna putih yang saat ini berada pada penggugat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna krem yang saat ini berada pada tergugat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih yang saat ini berada pada tergugat, uang julo-julo yang dikelola atau dijalankan oleh tergugat sejak tahun 2003 sampai sekarang, sebanyak Rp.

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka petitum penggugat angka 2 poin 1, poin 3, dan poin 4 adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat. Harta bersama tersebut didapat atau diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, maka masing-masing mempunyai hak separuhnya sesuai Psl 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut adalah milik penggugat dengan tergugat. Dari hasil putusan hakim mengadili:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat satu unit bangunan rumah dengan ukuran 12m x12.5m (luas 150m²), yang terletak di kelurahan jati kecamatan padang timur kota padang dengan batas-batas sepadan tanah. Sebelah barat dengan tanah lia, sebelah utara dengan Bandar, sebelah timur dengan tanah yurni, sebelah selatan dengan jalan jati, di taksir seharga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Satu unit sepeda motor Suzuki shogun, satu unit sepeda motor Yamaha mio, warna krem.
3. Menetapkan antara penggugat dan tergugat berhak masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat seperdua bagian harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka akan dilaksanakan dengan cara pelelangan secara umum.
5. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Didalam pertimbangan hakim ini, terlihat bahwa hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 KHI, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum adat juga di muat dalam memutuskan perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya, karena rumah tersebut berdiri di atas tanah ulayat kaum tergugat, dalam ungkapan adat minangkabau, kabau pai kubangan tingga bermakna kerbau mana saja bisa datang dan menggunakan sebuah kubangan, tapi setelah selesai digunakan kubangan tadi tidak bisa ikut dibawa-bawa. Dengan adanya ketentuan adat yang mengatur tanah ulayat maka tanah ulayat disebut juga tanah pusako tinggi karena tidak dikenal lagi pemilik pertama. Menurut adat untuk memanfaatkan tanah pusako tinggi berlaku empat asas:

1. Asas pemisah adalah terpisahnya antara tanah dengan tumbuh- tumbuhan dan bangunan diatasnya, sehubungan azas ini dalam adat ditemukan fatwa bahwa tanah pusako tinggi airnya yang boleh diminum, hasilnya boleh dinikmati, tanah tetap tinggal. Maka tanah pusako tinggi tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.
2. Asas komunal adalah tanah pusako tinggi dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota kaum/suku, tetapi pengelolaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada masing-masing ganggam bauntuak.
3. Asas keutamaan adalah kemenakan bertali darah (garis keturunan ibu) memperoleh prioritas utama dalam mewarisan tanah pusako tinggi, kalau dibandingkan kemenakan bertali adat dan seterusnya.
4. Asas unilateral adalah pewarisan tanah pusako tinggi hanya berlaku untuk satu garis keturunan ibu (matrilineal).⁸⁹

Kesatuan Hukum Pertanahan Nasional dibentuk dengan didasari oleh Hukum Tanah Adat yang telah berlaku sebelumnya, karena hukum tanah adat tersebut telah dianut asas pemisahan horizontal, oleh sebagian besar rakyat Indonesia Maka penerapan asas horizontal dalam hukum pertanahan nasional merupakan konsekuensi dari ditetapkannya Hukum Tanah Adat sebagai dasar pembentukan Hukum Pertanahan Nasional. Kesatuan Hukum Pertanahan Nasional dibuktikan dengan terbentuknya UUPA.

Dalam asas pemisahan horizontal, tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dapat dipisahkan, tidak harus melekat antara keduanya, asas pemisahan horizontal hak-hak atas tanah yang merupakan sifat asli hak-hak dalam hukum adat, tetap dipertahankan tetapi disesuaikan dengan kenyataan kebutuhan masyarakat masa kini. Hak atas tanah tidak meliputi pemilikan atas bangunan yang ada di atasnya. Bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas suatu bidang tanah adalah milik pihak yang membangun atau yang

menanam, baik pihak itu pemegang hak atas tanahnya sendiri atau bukan, kecuali jika ada perjanjian sebaliknya. Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang ada di atasnya, kalau hal itu tidak secara tegas dinyatakan.⁹⁰

Asas pemisahan horizontal bukan hanya dalam konteks terpisahnya pemegang hak milik atas benda bukan tanah di atas tanah hak milik orang lain, tetapi pemahaman tersebut perlu diperluas atau ditambah bahwa asas pemisahan horizontal adalah asas yang menjelaskan bahwa subjek hukum pemegang hak milik atas benda di atas tanah, berbeda dengan subjek hukum pemegang hak milik atas tanah tersebut.⁹¹ Peneliti berpandangan bahwa apabila alasan hakim mempergunakan asas pemisahan horizontal sebagai dasar memutus perkara ini menjadi kurang tepat karena asas pemisahan horizontal dapat saja dipakai dalam hak ketika seseorang / badan hukum menyewa tanah. Asas pemisahan horizontal dalam hukum tanah di Indonesia dapat digunakan ketika seorang atau badan hukum menyewa tanah untuk mendirikan bangunan di atul dalam pasal 44 ayat 1 UUPA. Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak sewa untuk bangunan, yaitu seseorang atau badan hukum menyewa tanah kosong yang merupakan Hak Milik orang lain untuk mendirikan bangunan di atasnya dengan membayar sejumlah uang sewa untuk jangka waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak.⁹²

Dari apa yang telah di jabarkan dalam BAB IV ini tampak adanya kekosongan hukum yaitu bagaimana pembagian harta bersama berupa bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum sebagaimana dalam putusan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg dalam pertimbangan hakim ini, terlihat pada angka 2 poin 1 hakim menyatakan harta bersama tersebut didapat atau diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat maka masing- masing mempunyai hak separuhnya, dalam hal ini hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum adat juga di muat dalam memutuskan perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya, karena rumah tersebut berdiri di atas tanah ulayat kaum tergugat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum bahwa dalam hal ini untuk mewujudkan suatu keadilan hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, bahwa adanya sebuah kepastian hukum maka tidak adanya kekosongan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang ditulis oleh penulis dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim Pengadilan Agama Padang dalam hal memutuskan perkara pada umumnya didasarkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak. Hasil putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.PDG seperti yang telah diuraikan dalam Putusan bahwa majelis hakim mengabulkan sebahagian gugatan penggugat berupa rumah yang dibangun di tanah kaum tergugat serta dua unit sepeda motor, hasil dari pembagian harta bersama tersebut majelis hakim memutuskan untuk dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk kedua belah pihak. Hakim di dalam putusannya menimbang bahwa oleh karena harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah ulayat kaum tersebut didapat atau diperoleh selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka masing-masing berhak separuhnya sesuai Pasal 97 KHI, maka harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan tergugat maka masing-masing berhak separuhnya. Didalam pertimbangan hakim ini, terlihat bahwa hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 KHI, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum

adat juga di muat dalam memutuskan perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah ulayat “tanah ulayat bersifat tetap”, maksudnya tanah ulayat tidak dapat berubah status kepemilikannya. Bahwa terhadap tanah, Hukum Adat menganut asas pemisah, terpisahnya antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya, sehubungan azas ini dalam adat ditemukan fatwa bahwa tanah pusako tinggi airnya yang boleh diminum, hasilnya boleh dinikmati, tanah tetap tinggal. Maka tanah pusako tinggi tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain.

Dalam gugatan tersebut hakim juga mengabulkan gugatan penggugat lainnya yaitu, Satu unit sepeda motor Suzuki shogun, Satu unit sepeda motor Yamaha mio, warna krem, menetapkan antara penggugat dan tergugat berhak masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas, menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat seperdua bagian harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natural, maka akan dilaksanakan dengan cara pelelangan secara umum, menolak dan tidak menerima. Hakim di dalam putusannya menimbang bahwa oleh karena harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah ulayat kaum tersebut didapat atau diperoleh selama dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, maka masing-masing berhak separuhnya sesuai Pasal 97 KHI, maka harta bersama tersebut adalah milik penggugat dan tergugat maka masing-masing berhak separuhnya. Berdasarkan teori kepastian hukum Jan Micheal Otto bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan perjanjian hukum didalam perkawinan memiliki beberapa tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bagi pasangan suami istri, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” . Harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama, apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama, pembagian harta bersama tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan yang diatur oleh undang- undang perkawinan dan diatur dalam kompilasi hukum islam dimana pembagian harta bersama dilakukan melalui proses sidang di pengadilan agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Pengadilan agama padang memutuskan bahwa antara harta penggugat dan tergugat yang telah melekat menjadi satu yaitu tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya untuk dibagi dua karena untuk memenuhi rasa keadilan dan menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat, dalam asas pemisahan horizontal, tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dapat dipisahkan, tidak harus melekat antara keduanya Asas pemisahan horizontal bukan hanya dalam konteks terpisahnya pemegang hak milik atas benda bukan tanah di atas tanah hak milik orang lain, tetapi pemahaman tersebut perlu diperluas atau ditambah bahwa asas pemisahan horizontal adalah asas yang menjelaskan bahwa subjek hukum pemegang hak milik atas benda di atas tanah, berbeda dengan subjek hukum pemegang hak milik atas tanah tersebut. Tampak adanya kekosongan hukum yaitu bagaimana pembagian harta bersama berupa bangunan yang didirikan di tanah ulayat kaum sebagaimana dalam putusan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg dalam pertimbangan hakim ini, terlihat pada angka 2 poin 1 hakim menyatakan harta bersama tersebut didapat atau diperoleh

selama dalam perkawinan penggugat dengan tergugat maka masing-masing mempunyai hak separuhnya, dalam hal ini hakim hanya mempergunakan norma hukum yang didasari pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun hakim tidak mempertimbangkan bahwa seharusnya norma hukum adat juga di muat dalam memutuskan perkara karena perkara ini bukan hanya berupa pembagian harta bersama biasa namun terdapat aspek hukum adat di dalamnya, karena rumah tersebut berdiri di atas tanah ulayat kaum tergugat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari sengketa harta bersama setelah perceraian sebaiknya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan calon pasangan suami istri untuk membuat suatu perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum agar mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
2. Hakim dalam memberikan putusan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan putusan tersebut karna di dalam perkara itu ada hak yang harus diberikan sama rata kepada kedua belah pihak, oleh sebab itu hakim harus mengutamakan keadilan, kemaslahatan, kepastian hukumnya dan manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum syara.
3. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan, karena mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ruang lingkup pengaturannya yang tidak terlalu luas, dan juga adanya aturan Perda yang membahas aturan harta bersama yang melekat dengan tanah ulayat mengingat di setiap wilayah Indonesia masih terikat dengan hukum adat yang berlaku sehingga dengan adanya pengaturan yang lebih lanjut maka akan lebih menjamin kepastian hukum mengenai Harta bersama bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Dan Soedjono, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, Dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ali Ahmad, 2010, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan, Judicial Prudence*.
- Amir Nuruddin Dkk, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana-Prenadamedia Group, hlm 18.
- Bungin Burhan, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Daman, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, hlm 27.
- Harba H.M, 2015, *Hukum Agrarian Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Harsono Boedi, 2008, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan.
- Hegel, 2002, *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193.
- Mamudji Sri, Soekanto Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Munir Syah, 2005, *Eksistensi Tanah Ulayat Perundang-Undang Di Indonesia*, Padang, PPIM.
- Nasution Syukri Albani, 2019, *Hukum Perkawinan Muslim*, Jakarta, KENCANA, hlm 121.
- Rafiq Ahmad, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ramulyo Idris Muhammad, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Sembirin Rosnidar g, 2016, *Hukum Keluarga(Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Jakarta, PT Rajagrafindo, hlm 86-87.
- Sembiring Rosnidar, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Soesangobeng, 1998, *Filosofi Adat Dalam UUPA*, Jakarta, LASA.
- Supriadi, 2018, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.
- Syahrizal, 2004, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Intekrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Aceh*, Aceh, Nadya Foundation, hlm 179.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agrarian Kajian Komprehensip*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 22.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Zainuddin Musyair, 2016, *Serba-Serbi Adat Minangkabau*, Yogyakarta, Ombak, hlm 68-71.

Zurifah Nurdin, 2016, *Teori Receptio A Contrario*, Bengkulu, IAIN Bengkulu, hlm 85.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Peraturan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

Jurnal

A Salman Manggalatung, 2014, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, 2014, Vol 2, No. 2 , hlm 191.

Abdullah Jafir, 2018, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Social Dan Keagamaan*, Vol 14, No 2, hlm 84.

Achmad Asfi Burhanudin, 2021, “Eksistensi Hukum Adat Modernisasi”,

SALIMIYA, 2021, Vol 2, No 4, hlm 102.

Alfin Rahman, 2022, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minang Kabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat”, *Recht Studiosum Law Review*, 2022, Vol 1, No 2, hlm 54.

Arina Noviza Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019 “Hukum Tanah Adat/ Ulayat”, *Universitas Al-Azhar*, 2019, Vol IV. No 1, hlm 44.

Chintia Devi, 2021, “Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”, *Yustisia Tirtayasa*, 2021, Vol 1 No 1, hlm 20.

Cicilia Putri Andari, Djumadi Purwoatmodjo, 2019, “Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah”, *NOTARIUS*, Vol 12 No 2, hlm. 707.

Djuniarti Evi, 2016, “Hukum Harta Bersama Di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuhperdata”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 17, No. 4.

Dwi Anindya Harimurti, 2021, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Gagasan Hukum*, 2021, Vol 03, No 02, hlm 151-152.

Elko Lucky Franklin Kandou, 2023, “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata”, *Lex Administratum*, 2023, Vol XII, No 5, hlm 5.

Evi Djuniarti, 2017, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPperdata”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 2017, Vol. 17 No. 4, hlm. 8

Faizal Kurniawan Dan Dyah Devina Maya Banindra, 2017, “Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunan”, *Yuridika*, 2017, Vol 32, No 2, hlm 229.

Fitrah Akbar Citrawan, 2020, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2020, Vol 50, No 30, hlm 592.

Inya Nuansa Iliyin, Rihantoro Bayuaji, Khusnul Yakin, 2023, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2023, Vol 1, No 2, hlm 85.

Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho, 2022, “Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif Dan

- Hukm Islam”, *Jurnal El-Dusture*, 2022, Vol 1, No 1, hlm 76.
- John Kenedi, 2018, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian”, *MANHAJ Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2018, Vol 3, No 1, hlm 99-100.
- Kumara Gada Citra Made I, 2021, “Kepastian Hukum Pemegang Ha Katas Tanah Dalam System Hukum Pertanahan Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, No. 3.
- Liky Faizal, 2015, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Ijtima’iyya*, 2015, Vol 8, No 2, hlm 96.
- M. Beni Kurniawan, 2018, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan”, *Yudisial*, 2018, Vol 11, No 1, hlm 42-43.
- Marwan Mas, 2012, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Komisiyudisial*, 2012, Vol 5, No 3, hlm 287-288.
- Melia, Muzakkir Abubakar, Darmawan, 2019, “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian”, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 7, No 3, hlm 510.
- Nunuk Sulisrudatin, 2014, “Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria”, *Jurnal Imiah Hukum Dirgantara*, vol. 4, No. 3.
- Nurjanah , Lomba Sultan, Fatmawati, 2023, “Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia”, *Madani*, 2023, Vol 1, No 11, hlm 681-682.
- Potak Siri Ngoringo, Paltiada Saragi, Indri Januar, 2023, “Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Honeste Vivere Journal*, 2023, Vol 33, No 2, hlm 145-146.
- Prihatini Purwaningsih Dan Latifah Ratnawaty, 2017, “Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau”, *Journal YUSTITA*, vol. 4, No. 1.
- Rinel Fitlayeni, 2015, “Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman”, *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 2015, Vol 2, No 2, hlm 152-153.
- Safira Mahalini Utami, 2023, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”, *Jakarta: Jurnal USM Law Review*, vol. 6, No. 1.
- Siti Mustaghfiroh, Nely Melinda, 2022, “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022, Vol 2, No 1, hlm 108.
- Sri Hariati dan Musakir Salat, 2013, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property”, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 3, hlm 2
- Sufirman Rahman, Nurul Qamar, Muhammad Karman, 2020, “Efektifitas Pembagian Harta Bersama Oasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami”, *SIGN Jurnal Hukum*, 2020, Vol 1, No 2, hlm 106.
- Sukarni, 2021, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 2021, Vol 2, No 3, hlm 359.
- Sulistorini Santi Baiq, 2019, “Problematika Eksekusi Putusan harta Bersama Di Atas Tanah Adat”, *Mataram: Jurnal Schemat IAIN*, vol. 8, No.2.
- Tesya Veronica, Atik Winanti, 2021, “Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara”, *Humani*, 2021, Vol 11, No 2, hlm 310.
- Tesis**
- Gema Putri, 2018, “Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Pasar Di Kota Payakumbuh” *Tesis Megister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Padang.*

- Ikhsan Kurnia, 2023, “Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan”, *Tesis Megister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Padang.*
- Inggir Deviandari, 2021, “Pengadaan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Perumahan Bersubsidi Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Tesis Megister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, Padang.*

Putusan

Putusan nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg

Artikel

Dadi Suryandi, Peran Kerapatan Adat Nagari KAN Dalam Menyelesaikan Sengkata Tanah Ulayat Kaum [https://Badilum.Mahkamah Agung.Go.Id/Artikel-Hukum](https://Badilum.Mahkamah%20agung.Go.Id/Artikel-Hukum). Diakses 20 Januari 2025 Pukul 20:57.

Mesa Siti Meisaroh, 2021, Hukum Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <https://Heylaw.Id/Blog/Hukum-Perkawinan>. Diakses 20 Januari 2025 Pukul 23:40.

Marhaini Ria Siombo, 2016, Asas-Asas Hukum Adat, <https://Scholar.Google.Com/Scholar>. Diakses 21 Januari 2025 Pukul 07:04.